

## ABSTRAK

**Siti Nor Sa'adah.** 2023. *Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Dana BLT, Pemerintah Desa

Penelitian ini dilatar belakangi dari keresahan warga terhadap ketidak merataannya dana bantuan dalam hal tata kelola dana bantuan langsung tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong, dikarenakan hanya 66 kepala keluarga (KK) yang tercatat menerima bantuan langsung tunai dari jumlah 137 kepala keluarga (KK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam tata kelola dana bantuan langsung tunai di Desa Jimamun dan bagaimana transparansi dana bantuan langsung tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, serta mengenai transparansi dana bantuan langsung tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya data yang disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan hukum positif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan terutama dalam hal tata kelola dana bantuan langsung tunai oleh Pemerintah Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah dijalankan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu melakukan perencanaan keuangan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan juga sesuai dengan konsep *good governance* seperti konsep partisipasi dan akuntabilitas meskipun dalam hal transparansi pada pelaksanaannya belum maksimal karena masih terkendala untuk penggunaan *Website*. Adapun faktor kendala dari Pemerintahan Desa Jimamun dalam pengelolaan atau penggunaan *Website* dikarenakan faktor kondisi geografis yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang mampu untuk mengoperasikan.